

**HUBUNGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
PADA PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN PUBLIK INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Oktavia Dwi Nur Diah Ningrum

12030110110029

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Oktavia Dwi Nur Diah Ningrum

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110110029

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **HUBUNGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
PADA PENGUNGKAPAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PUBLIK INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Faisal, SE., M.Si., Ph.D., Akt.

Semarang, 09 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

(Faisal, SE., M.Si., Ph.D., Akt.)

NIP. 197109042001121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Oktavia Dwi Nur Diah Ningrum

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110110029

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **HUBUNGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN
PADA PENGUNGKAPAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PUBLIK INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 01 Juli 2014

Tim Penguji

1. Faisal, SE., Akt., M.Si., Ph.D. (.....)

2. Herry Laksito, S.E., M. Adv. Acc., Akt. (.....)

3. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Oktavia Dwi Nur Diah Ningrum, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Hubungan Struktur Kepemilikan Pada Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Publik Indonesia, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan, atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat, atau simbol yang menunjukkan gagasan, atau pendapat, atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian, atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin, atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar, dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 09 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,

(Oktavia Dwi Nur Diah Ningrum)

NIM : 12030110110029

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ دَلِكُمْ ۖ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَأَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَجَاهِدُوا وَتَقَالَا خِفَافًا أَنْفِرُوا

“ Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. “

(QS: At Taubah, 9: 41)

“inna allaaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaayughayyiruu maa bi-anfusihim”

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS: Ar-Ra'd: 11)

“Nothing eternal life in the world, so you must do best something in your live.

Cause Allah like people have a effort to herself”

From me

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Mamah, Papah, Kakak, dan Adek,

serta orang-orang yang aku sayangi,

atas segalanya,

Sehingga diri ini mampu mengetik ucapan persembahan ini.

ABSTRACT

This background of study was operational activity of public companies in Indonesian had impact of environment. This impact made companies must did activities of corporate social responsibility, next to made a report of corporate social responsibility disclosure, or called sustainability report. Sustainability report used by shareholders to take a investment decision. Then, formulation of problem in this study was “how to relationship of ownership structure on corporation social responsibility disclosure in Indonesian public corporation”. This study aims to know a relationship of ownership structure on the corporate social responsibility disclosure in Indonesian public corporate, and provided into sustainable report of companies listed on Indonesian Stock Exchange (IDX). Ownership structure tested in this study were ownership concentration, managerial ownership, foreign ownership, and government ownership. This study using two proxy were disclosure index, and total of sentence quantity disclosure.

An dependent variable, CSRD was measured by Global Reporting Index (GRI) based on Said, et.al.research in 2009. Control variable in this study consisted of firm size, profitability, firm age, and leverage. By using a purposive sampling method, 34 listed companies of all companies listed on IDX in the study based on their 2010, 2011, and 2012 sustainable report, and data were analyzed using multiple regression. The result of empirical indicated that foreign ownership had a positive, and significant association on CSRD in disclosure index proxy. Then, a result total of sentence quantity disclosure were government ownership had a positive, and significant association on CSRD.

Keywords: *Corporate Social Responsibility Disclosure, Ownership Structure, Firm Size, Profitability, Firm Age, Leverage.*

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah aktivitas operasional perusahaan publik Indonesia mempunyai dampak lingkungan. Dampak tersebut membuat perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan, kemudian membuat laporan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, atau yang disebut dengan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan digunakan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan investasi. Maka rumusan masalah di penelitian ini adalah bagaimana hubungan struktur kepemilikan pada pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan di perusahaan publik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan struktur kepemilikan pada pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan di Indonesia, dan ditentukan dalam laporan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di *Indonesian Stock Exchange* (IDX). Struktur kepemilikan yang diuji dalam penelitian yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manjerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Penelitian ini menggunakan 2 proksi, yaitu indeks disclosure, dan total pengungkapan jumlah kalimat.

Sebagai variabel dependen, dalam penelitian ini pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan diukur menggunakan *Global Reporting Index* (GRI) berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Said, *et.al.* pada tahun 2009. Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan *leverage*. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, 34 perusahaan dari semua perusahaan yang terdaftar di IDX didasarkan pada laporan keberlanjutan perusahaan tahun 2010, 2011, dan 2012, dan data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil empiris mengindikasikan bahwa kepemilikan asing memiliki hubungan positif, dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada proksi indeks disclosure. Lalu, untuk proksi total pengungkapan jumlah kalimat memiliki hubungan positif, dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Kata kunci: Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Umur Perusahaan, *Leverage*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat yang diberikan, sehingga dapat diselesaikan skripsi dengan judul: **“HUBUNGAN STRUKTUR KEPEMILIKAN PADA PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PUBLIK INDONESIA”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, saran, serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohamad Nasir, MSi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, MSi., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang selalu memberikan nasehat dan motivasi,
3. Bapak Faisal SE., M.Si, Ph.D., Akt., selaku Dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan dan petunjuk dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik,

4. Bapak Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali atas arahan yang telah diberikan,
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro untuk ilmu bermanfaat yang telah diajarkan,
6. Seluruh staf tata usaha, dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai,
7. Papah, dan mamahku tercinta, atas segala bantuan, dan dukungan baik material, maupun spiritual yang diberikan selama proses penyusunan skripsi,
8. Kakakku, dan Adekku tercinta, dr Dewi Meika M, Maya Indah T, Fikri Zimamul, dan Estuning Putri S, terima kasih atas dukungan kalian selama ini,
9. Masku, Arif Syehfudin SE., yang selalu memberikan dukungan, semangat, inspirasi, dan doa selama proses penyusunan skripsi,
10. Segenap Saudara, dan Kerabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, dan semangat selama penyusunan skripsi hingga selesai,

11. Untuk teman-teman seperjuangan akuntansi 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan kebersamaan kita selama empat tahun.
12. Untuk sahabat-sahabatku “LUNZA 4”, Uni (Yulia Netti), Miss Kumis (Marlina Liftiani), dan Ditong (Dita E Claudya) yang selalu memberikan dukungan, doa, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Pihak-pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semarang, 09 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Institusional	12
2.1.2 <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	19
2.1.2.1 Definisi CSR	19
2.1.2.2 <i>Corporate Social Disclosure</i>	21
2.1.3 <i>Corporate Governance (CG)</i>	24
2.1.3.1 Definisi CG	24
2.1.3.2 Struktur Kepemilikan	27
2.1.3.2.1 Konsentrasi Kepemilikan	27
2.1.3.2.2 Kepemilikan Manajerial	28
2.1.3.2.3 Kepemilikan Asing	29
2.1.3.2.4 Kepemilikan Pemerintah	30
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Pemikiran	41

2.4 Hipotesis	42
2.4.1 Hubungan Negatif Antara Konsentrasi Kepemilikan Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	42
2.4.2 Hubungan Negatif Antara Kepemilikan Manajerial Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	43
2.4.3 Hubungan Positif Antara Kepemilikan Asing Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	45
2.4.4 Hubungan Positif Antara Kepemilikan Pemerintah Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	48
3.1.1 Variabel Dependen	48
3.1.2 Variabel Independen	50
3.1.2.1 Konsentrasi Kepemilikan	50
3.1.2.2 Kepemilikan Manajerial	50
3.1.2.3 Kepemilikan Asing	51
3.1.2.4 Kepemilikan Pemerintah	51
3.1.3 Variabel Kontrol	51
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan	51
3.1.3.2 Profitabilitas	52
3.1.3.3 Umur Perusahaan	52
3.1.3.4 Leverage	53
3.2 Populasi dan Sampel Penelitish	53
3.3 Jenis dan Sumber Data	54
3.4 Metode Pengumpulan Data	54
3.5 Metode Analisis	55
3.5.1 Statistik Deskriptif	55

3.5.2 Analisis Trend	55
3.5.3 Uji Korelasi	55
3.5.4 Uji Asumsi Klasik	56
3.5.4.1 Uji Normalitas	56
3.5.4.2 Uji Multikolonieritas	57
3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas	57
3.5.5 Analisis Regresi Berganda	58
3.5.6 Uji Hipotesis	59
3.5.6.1 Koefisien Determinasi	59
3.5.6.2 Uji Statistik F	60
3.5.6.3 Uji Statistik t	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Objek Penelitian	62
4.2 Analisis Data	63
4.2.1 Statistik Deskriptif	63
4.2.2 Analisis Trend	80
4.2.3 Uji Korelasi	86
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	95
4.2.4.1 Uji Normalitas	96
4.2.4.2 Uji Multikolinearitas	101
4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas	109
4.2.5 Uji Hipotesis	114
4.2.5.1 Hasil Koefisien Determinasi	114
4.2.5.2 Hasil Uji Statistik F	116
4.2.5.3 Hasil Uji Statistik t	117
4.3 Inteprestasi Hasil	134
4.3.1 Hubungan Negatif Antara Konsentrasi Kepemilikan dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	134

4.3.2 Hubungan Negatif Antara Kepemilikan Manajerial dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	136
4.3.3 Hubungan Positif Antara Kepemilikan Asing dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	139
4.3.4 Hubungan Positif Antara Kepemilikan Pemerintah dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan	141
BAB V PENUTUP	144
5.1 Simpulan	144
5.2 Keterbatasan Penelitian	146
5.3 Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	149

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	37
Tabel 4.1 Ringkasan Populasi dan Sampel Penelitian	62
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	65
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 1 Proksi Indeks Disclosure	79
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif 2 Proksi Total Pengungkapan Jumlah Kalimat	79
Tabel 4.5 Analisis Trend	81
Tabel 4.6 Uji Korelasi pada Proksi Indeks Disclosure	87
Tabel 4.7 Uji Korelasi pada Proksi Total Pengungkapan Jumlah Kalimat	92
Tabel 4.8 Uji <i>One Sample Kolmogorov Sminov</i>	100
Tabel 4.9 Uji Multikolonieritas	102
Tabel 4.10 Uji Multikolonieritas Pada Proksi Indeks Disclosure	104
Tabel 4.11 Uji Multikolonieritas Pada Proksi Total Pengungkapan Jumlah Kalimat	107
Tabel 4.12 Uji Glejser Pada Proksi Indeks Disclosure	112
Tabel 4.13 Uji Glejser Pada Proksi Total Pengungkapan Jumlah Kalimat	113
Tabel 4.14 Uji Koefisien Determinasi	114
Tabel 4.15 Uji Statistik F	116
Tabel 4.16 Uji Signifikansi t	118
Tabel 4.17 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Pada Proksi Indeks Disclosure.....	133
Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis Pada Proksi Total Pengungkapan Jumlah Kalimat	133

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Kerja Teoritis Institusional	19
Gambar 2.2 Model Empiris Penelitian	41
Gambar 4.1 Histogram Normalitas Pada Proksi Indeks Disclosure	97
Gambar 4.2 Normal Probability Plot Pada Proksi Indeks Disclosure....	97
Gambar 4.3 Histogram Normalitas Pada Proksi Total Pengungkapan Jumlah Kalimat	99
Gambar 4.4 Normal Probability Plot Pada Proksi Total Pengungkapan Jumlah Kalimat	99
Gambar 4.5 Uji Heteroskedasitas Pada Proksi Indeks Disclosure	110
Gambar 4.6 Uji Heteroskedasitas Pada Proksi Total Pengungkapan Jumlah Kalimat	110

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Perusahaan Sampel	154
LAMPIRAN B <i>Global Reporting Initiatives</i> 3.1	156
LAMPIRAN C Hasil Analisis Regresi	159

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menjelaskan latar belakang penelitian mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, serta hubungannya dengan struktur kepemilikan. Selain itu, juga dibahas mengenai rumusan masalah sebagai fokus penelitian, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini, perusahaan di seluruh dunia terutama perusahaan multinasional sedang melakukan peningkatan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan, atau yang disebut dengan *corporate social responsibility* (CSR)¹². Demikian juga, perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga melakukan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan. Hal ini karena perusahaan-perusahaan tersebut merasakan adanya manfaat dari melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut, seperti: kinerja keuangan menjadi lebih baik, adanya akses dalam modal, mengurangi biaya operasi

¹ CSR secara umum merupakan suatu kumpulan kebijakan, dan praktek yang berhubungan dengan pemangku kepentingan, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

² Dalam penelitian ini, CSR merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh perusahaan publik atas pertanggungjawaban dari kegiatan operasi perusahaan kepada pemangku kepentingan, antara lain: pemegang saham, pemerintah, kreditur, debitur, serta masyarakat yang dilaksanakan secara sukarela, dan wajib.

meningkatkan citra merek dan reputasi, peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan, serta peningkatan produktivitas dan kualitas (csrnetwork.org, 2006; dikutip oleh Said, *et.al.*, 2009). Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, seperti: Indocement, Unilever, Telkom, Aneka Tambang, dan lainnya melakukan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai program rutin tahunan mereka. Wujud tanggungjawab sosial perusahaan yang dilakukan secara umum bervariasi, seperti: pemberian beasiswa pendidikan, penanaman kembali (*replantation*), pemeliharaan lingkungan perumahan di sekitar lokasi pabrik, penyediaan air bersih di daerah yang kering, serta berbagai kegiatan bertema sosial, dan lingkungan.

Praktik pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat, dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan. Alasan perusahaan di Indonesia melakukan kegiatan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, karena kegiatan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Menyatakan bahwa perseroan yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial, dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Serta bagi pelanggar yang melanggar undang–undang tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan tersebut.

Motivasi perusahaan melakukan kegiatan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, yaitu adanya kritikan yang disampaikan oleh masyarakat, pemerintahan, dan organisasi non pemerintahan, seperti: Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) mengenai dampak–dampak sosial, dan lingkungan yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan. Contoh kasus kerusakan lingkungan di Indonesia, antara lain: melubernya lumpur, dan gas di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan eksploitasi gas PT. Lapindo Brantas, serta kasus kerusakan lingkungan di dunia Internasional adalah kasus kebocoran PLTN di Jepang, yang disebabkan oleh ketidaksiapan perusahaan dalam menghadapi bencana gempa. Akibat dari kebocoran itu, yaitu terdapat kerusakan biota laut yang disebabkan oleh zat radioaktif. Seperti yang diungkapkan oleh Gray, *et.al.* (1987), bahwa kesadaran publik sangat diperlukan dalam peran perusahaan di masyarakat. Kesadaran publik tersebut, akan menimbulkan beberapa kritikan yang dapat menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat keamanan produk, serta hak dan sosial tenaga kerja.

Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk melakukan tanggungjawab sosial atas dampak aktivitas yang dihasilkan terhadap masyarakat. Selain itu, perusahaan juga bertanggungjawab terhadap kelompok pemegang saham, direktur, manajer, karyawan, pelanggan, pemasok, penasehat, konsultan, pesaing, pemerintah, rekan bisnis, komunitas lokal, dan media grup. Praktik pertanggungjawaban sosial di perusahaan juga merupakan jaminan kepada pemangku kegiatan (*stakeholders*) bahwa perusahaan telah memberikan hubungan timbal balik atas keuntungan yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya pengungkapan informasi oleh perusahaan tentang tanggungjawab sosial perusahaan (Guthrie, and Mathews, 1985). Menurut Said,

et.al. (2009), *corporate social responsibility disclosure* (CSR¹) digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan, dan non keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik, serta lingkungan sosialnya, yang dapat dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan, atau dalam laporan tentang penerapan tanggungjawab sosial yang terpisah. Selain itu, Farache, dan Perks (2010) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan CSR¹ sebagai sebuah alat untuk menghadapi kesadaran perusahaan secara sosial agar sikap perusahaan dapat terlegitimasi dengan konstitusi perusahaan.

Pelaporan *corporate social disclosure* (CSD)² digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan melaporkan kegiatan perusahaan, atau melalui pengungkapan tambahan (Said, *et.al.*, 2009). Laporan CSD yang diterbitkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu dalam bentuk laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan tersebut telah banyak dipraktekkan di Indonesia, dan disusun dengan menggunakan GRI yang telah dikembangkan sejak tahun 1990. Versi GRI yang digunakan dalam penelitian ini adalah GRI versi 3.1, yaitu versi terbaru yang dikeluarkan pada

¹ *Corporate social responsibility disclosure* (CSR¹), atau pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai strategi manajemen lingkungan untuk melakukan kegiatan komunikasi dengan pemangku kepentingan (Setyorini, dan ishak, 2012, h.152).

² *Corporate social disclosure* (CSD) juga disebut sebagai *corporate social responsibility disclosure* (CSR¹) (Deegan, 2007). pengungkapan sosial perusahaan, atau *corporate social disclosure* (CSD) adalah pengungkapan informasi finansial, dan non-finansial yang berhubungan dengan organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial, yang dinyatakan dalam laporan tahunan perusahaan, ataupun laporan sosial yang terpisah. Pengungkapan sosial perusahaan (*corporate social disclosure*) secara rinci meliputi lingkungan fisik, energi, sumberdaya manusia, produk dan keterlibatan masyarakat (Hackton, dan Milne, 1996).

tahun 2010. Laporan keberlanjutan (*sustainable report*)³ menjadi sebuah tren, dan kebutuhan bagi perusahaan progresif dalam menginformasikan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya untuk seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Menurut Said, *et.al.* (2009), bahwa laporan keberlanjutan menjamin akan kepentingan pemegang saham, atau investor yang ada, sehingga perlu adanya keterkaitan dengan implementasi tatakelola perusahaan yang efektif. Selain itu, pengungkapan laporan keberlanjutan semakin mendapatkan perhatian dari praktik bisnis global, dan juga merupakan salah satu kriteria dalam menilai praktik tanggungjawab sosial perusahaan. Menurut CSR Quest (dikutip oleh Dilling, 2010, h.19), para *stakeholders* perlu menyadari adanya pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya sebagai laporan keuangan saja), dan mendukung strategi perusahaan, serta dapat menunjukkan komitmen dalam perkembangan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep umum dari perkembangan berkelanjutan berasal dari sebuah laporan yang dinamakan “*Our Common Future*” oleh *Worlds Commission on Environment and Development* (dikenal sebagai *Brundtland Commission*) yang diprakasai oleh *United Nations (Brundtland Commission* dalam Dilling, 2010, h.10).

³ *Sustainability report* (SR), atau laporan keberlanjutan merupakan praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi baik perusahaan pemerintah, atau perusahaan publik dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang berisi tentang dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, atau pemangku kepentingan baik internal, maupun eksternal (pemerintah, kreditur, debitur, lembaga, investor asing, dll).

Corporate governance (CG)⁴ merupakan inti dari pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, yaitu untuk mengatasi masalah keagenan. CG diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pemberi keyakinan kepada pemangku kepentingan, sesuai dengan aturan yang ada, dan menjalani kerjasama yang aktif dengan pemangku kepentingan demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Aktivitas CSR tidak terlepas dari penerapan CG yang efektif, atau *good corporate governance* (GCG)⁵. Penerapan prinsip GCG secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan mampu mengurangi aktivitas menyimpang, seperti: rekayasa isi laporan keuangan yang tidak menggambarkan nilai sebenarnya (Kaihatu. 2006).

Hubungan antara tatakelola perusahaan, dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan sudah pernah diteliti oleh penelitian terdahulu, antara lain: penelitian dari Said, *et.al.* (2009) dimana proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, dan keberadaan komite audit memiliki hubungan positif, dan signifikan dengan tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Selain itu, penelitian Tanimoto, dan Suzuki (2005) membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong terhadap adopsi *Global Reporting Initiative* (GRI) dalam pengungkapan tanggungjawab sosial, yang berbanding terbalik dengan penelitian Said, *et.al.* (2009). Penelitian Khan, *et.al.* (2010), menyatakan bahwa kepemilikan

⁴ *Corporate governance* (CG) atau tatakelola perusahaan merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan, atau korporasi.

⁵ *Good corporate governance* (GCG) merupakan regulasi atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tatakelola perusahaan, yang terdiri dari 4 komponen penting yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*.

asing memiliki hubungan positif, dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian dari Soliman, *et.al.* (2012). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara struktur kepemilikan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dengan menginformasi laporan keberlanjutan. Struktur kepemilikan, atau *ownership structure*⁶ merupakan salah satu karakteristik dari tatakelola perusahaan. Mengacu dari penelitian yang dilakukan oleh Said, *et.al.* (2009), penelitian ini menguji hubungan antara pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, dan karakteristik tatakelola perusahaan pada perusahaan publik di Indonesia. Karakteristik tatakelola perusahaan yang diuji dihubungkan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Karakteristik tatakelola perusahaan dalam penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian Said, *et.al.* (2009), pertama adalah penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Alasan memilih laporan keberlanjutan sebagai media pengungkapan adalah karena laporan keberlanjutan memberikan informasi

⁶ Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan yang digunakan, antara lain: (1) Konsentrasi kepemilikan merupakan suatu kepemilikan saham perusahaan yang sebagian besar dimiliki oleh suatu kelompok, atau individu, dan juga untuk mengurangi kuantitas pemegang saham di perusahaan, sehingga dapat mengurangi konflik antara manajemen dengan *stakeholders*; (2) Kepemilikan manajerial memiliki manfaat dalam melaksanakan GCG, yaitu untuk mengurangi konflik agensi, atau konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik; (3) Kepemilikan asing merupakan kepemilikan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia; (4) Kepemilikan pemerintah adalah suatu intervensi pemerintah dalam kepemilikan di perusahaan yang dapat memberi tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi, disebabkan pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh masyarakat.

yang lebih lengkap, dan detail. Laporan keberlanjutan perusahaan dari tahun ke tahun semakin bertambah, karena semakin banyak perusahaan di Indonesia yang berpartisipasi dalam melakukan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan memiliki hubungan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan publik Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) merupakan suatu kegiatan yang bersifat wajib, dan sukarela bagi perusahaan publik dalam mengungkapkan dampak dari kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSRD di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya, dan dapat dilihat dari tingkat partisipasi perusahaan publik di Indonesia dalam mengikuti ajang penghargaan *Indonesian Sustainability Reporting Award* (ISRA). Tanggungjawab sosial perusahaan berfungsi untuk membangun reputasi perusahaan, antara lain: meningkatkan citra perusahaan, maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan lainnya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan, yaitu untuk meningkatkan *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* perusahaan. Tujuan pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut merupakan lima prinsip utama yang terkandung dalam GCG. Oleh karena

itu, tatakelola perusahaan memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan.

Telah banyak penelitian yang meneliti hubungan antara karakteristik tatakelola perusahaan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, antara lain: penelitian Ghazali (2007), Amran, dan Devi (2008), Said, *et.al.* (2009), Reverte (2009), Khan, *et.al.* (2010), Haji (2013), dan penelitian lainnya, yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini akan meneliti karakteristik tatakelola perusahaan (struktur kepemilikan saham perusahaan, antara lain: konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah) terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Kepemilikan saham merupakan bagian dari pemangku kegiatan perusahaan yang mengawasi kegiatan operasi perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu “Apakah konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah memiliki hubungan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan publik Indonesia ?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, serta

kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam laporan keberlanjutan pada perusahaan publik Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini, dapat digunakan oleh akademis sebagai acuan untuk penelitian yang tertarik dengan topik pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan,
2. Hasil penelitian ini, dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh informasi mengenai struktur kepemilikan yang memiliki hubungan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan di Indonesia,
3. Hasil penelitian ini, juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi investor, pemerintah, serta manajerial dalam pengambilan keputusan investasi yang dilihat dari penerapan segi tatakelola perusahaan, dan tanggungjawab sosial perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas lima bab, adapun urutan, dan uraian bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini, merupakan uraian mengenai isu-isu penelitian, dan permasalahan yang timbul sehingga mendorong terjadinya penelitian ini. Bab 1,

meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, menjelaskan teori-teori yang digunakan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti. Didalam penelitian terdapat juga kerangka pemikiran, dan hipotesis. Didalam kerangka pemikiran, terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel yang terkait dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, membahas tentang variabel penelitian, dan penjelasan yang mendukung variabel tersebut, jenis, dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini, berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

BAB V : PENUTUP

Bab ini, membahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan, keterbatasan penelitian yang dilakukan, dan saran-saran untuk pengembangan teori, dan aplikasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dibahas mengenai: (1) teori institusional yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini, serta konsep–konsep mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, tatakelola perusahaan, dan struktur kepemilikan; (2) uraian mengenai penelitian–penelitian yang sejenis yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya; (3) ringkasan mengenai kerangka pemikiran dari penelitian ini; serta (4) pengembangan hipotesis berdasarkan teori, dan penelitian terdahulu.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Institusional

Banyak studi awal yang menggunakan teori sosial, dan politik, khususnya teori legitimasi dalam menjelaskan praktik CSR. Menurut Tilling (2001) (dikutip oleh Amran, dan Devi, 2008, h.390), bahwa untuk menemukan teori yang menjelaskan CSR tidaklah mudah, dan penerapannya dapat dilakukan jika kondisi lingkungannya mendukung. Teori yang melandaskan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan itu, harus mampu menjelaskan fenomena yang menunjukkan ketidakkonsistenan suatu organisasi dalam mengungkapkan tanggungjawab sosialnya. Adams (2002) menyimpulkan bahwa, penelitian sebelumnya sudah baik dalam memberikan dukungan untuk menolak satu, atau lebih teori, serta tidak ada satupun teori yang secara konsisten mendukung, atau

menolak. Teori institusional hampir sama dengan teori legitimasi (*legitimacy theory*). Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan publik bahwa organisasi telah melakukan kegiatan sesuai dengan batasan, dan norma–norma didalam masyarakat dimana lingkungan organisasi tersebut beroperasi.

Sedangkan teori institusional (*institutional theory*), atau teori kelembagaan, menyatakan bahwa suatu terbentuknya sebuah organisasi disebabkan adanya tekanan lingkungan institusionalisasi. Teori institusional berbeda dengan teori legitimasi, perbedaan tersebut yaitu adanya regulasi dalam mengikat pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, regulasi yang dimaksud yaitu regulasi untuk pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan berupa UU No. 40 tahun 2007, dan regulasi untuk struktur kepemilikan berupa *good corporate governance* (GCG). Zucker (1987) (dalam Scott, 1987, h.496), menyatakan bahwa “keberadaan organisasi menjelaskan adanya ide, atau gagasan pada lingkungan institusional yang membentuk bahasa, serta simbol, serta diterima (*taken for granted*) sebagai norma-norma dalam konsep organisasi”. Eksistensi organisasi terjadi pada cakupan organisasional yang luas, dimana setiap organisasi saling mempengaruhi bentuk organisasi lainnya lewat proses adopsi, atau institusionalisasi (pelembagaan). Menurut DiMaggio, dan Powell (1983, h.148), bahwa:

Organisasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitar mereka. Ide-ide yang berpengaruh kemudian di institusionalkan, sehingga dianggap sah, dan diterima sebagai cara berpikir organisasi tersebut.

Proses legitimasi yang sering dilakukan oleh organisasi, yaitu melalui tekanan negara-negara, serta pernyataan-pernyataan. Teori institusional dikenal karena penegasannya atas organisasi, penegasan tersebut hanya sebagai simbol, dan ritual. Kekhususan teori institusional tersebut, terdapat dalam paradigma norma-norma berupa regulasi, dan legitimasi, cara berpikir serta semua fenomena sosio-kultural yang konsisten dengan pelaksanaan instrumen pada organisasi. DiMaggio, dan Powell (1983, h.149), melihat bahwa:

Organisasi terbentuk karena kekuatan di luar organisasi yang membentuk lewat proses mimicry, atau imitasi, dan compliance.

Proses *mimicry*, dan *compliance* merupakan proses penerimaan nilai-nilai, dan norma-norma dalam membentuk aturan yang dilegitimasi. Pemenuhan nilai-nilai, dan norma-norma terjadi karena perilaku sebagai implikasi dari penerimaan nilai dan norma tersebut dapat dipahami, serta bersifat *taken for granted*. Teori institusional pada cakupan perusahaan multinasional memberikan sumbangan dalam hal keluasan hubungan, kesadaran akan saling ketergantungan, informasi, serta pola dari kompetisi. Selain itu, adanya perilaku penggabungan antar organisasi sebagai faktor yang menentukan organisasi beradaptasi pada lingkungan yang kompleks dan tak terkendali. Menurut DiMaggio, dan Powell (1983, h.149), ada 2 tipe dari pengadopsian (*isomorphism*) dalam organisasi perusahaan, yaitu:

- a) Pengadopsian kompetitif (*competitive isomorphism*), menyebabkan adanya persaingan pasar, perubahan kedudukan, dan mengukur kecocokan. Tinjauan ini dapat menimbulkan terbukanya persaingan

bebas, dan perebutan wilayah persaingan diantara perusahaan publik. Selain itu, organisasi mengambil keputusan dengan melihat aspek lain.

- b) Pengadopsian institusional (*institutional isomorphism*), berguna untuk memahami politik, dan juga peristiwa yang mempengaruhi kehidupan organisasi modern. Organisasi yang bersaing tidak hanya karena sumber daya, atau pelanggan tetapi juga untuk kekuatan politik, legitimasi kelembagaan, serta tujuan sosial, dan ekonomi.

DiMaggio, dan Powell (1983, h.150), melihat ada tiga bentukan institusional yang bersifat *isomorphism*, atau pengadopsian dalam mengaitkan struktur kepemilikan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yaitu mimesis atau kognitif (*mimetic*), normatif (*normative*), dan regulatif atau koersif (*coercive*).

- a) Pengadopsian kognitif, atau mimesis (*mimetic isomorphism*) dijelaskan bahwa adanya tekanan yang dilembagakan dalam sebuah organisasi dimana secara budaya didukung, dan secara konseptual benar. Konseptual cenderung membuat organisasi untuk menyalin prosedur model yang digunakan oleh organisasi lain. Pada kasus pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan, dimana perusahaan sejenis bersaing dalam industri yang sama lebih memungkinkan sebagai referensi, dan meniru perusahaan yang dianggap superior.
- b) Pengadopsian normatif (*normative isomorphism*) merupakan tekanan untuk menyesuaikan diri dari seperangkat norma, dan aturan yang

dikembangkan oleh kelompok profesional dan pekerja. Struktur *normative isomorphism* lebih memelihara kesesuaian antara nilai-nilai bersama dalam organisasi. Sebagai contoh, adanya standar global, seperti: GRI yang dapat mengatur pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan publik yang umumnya sukarela.

- c) Pengadopsian regulatif atau koersif (*coercive isomorphism*) merupakan tekanan yang mengacu pada peran regulasi dalam mewujudkan prosedur kelembagaan. Contohnya, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan, dan investasinya telah mempengaruhi pemerintah yang terkait dengan pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan publik di Indonesia.

DiMaggio, dan Powell (1983, h.147), kemudian mengidentifikasi beberapa penyesuaian organisasi pada teori institusional, antara lain:

- a) Penyesuaian kategorial. Hal ini terjadi ketika aturan-aturan institusional mengarahkan organisasi membentuk struktur mereka. Konvensi-konvensi tersebut kemudian menghasilkan struktur yang homogen. Konvensi-konvensi tersebut kemudian menjadi semacam “kamus struktur” (Meyer dan Rowan, 1977). Organisasi digabungkan dalam sebuah sistem keyakinan kognitif seperti ini, karena akan memperbesar legitimasi organisasi, dan akan menambah sumber dan kapasitas ketahanan organisasi.
- b) Penyesuaian struktural. Disebabkan oleh peraturan pemerintah, ketidakpastian lingkungan, atau mencari legitimasi. Perusahaan akan

mengadopsi struktur organisasi yang spesifik (biasanya dengan menyewa seseorang dari perusahaan yang sukses, atau menyewa konsultan). Pemerintah biasanya memberlakukan peraturan baru pada organisasi, seperti: program keselamatan kerja, atau kelompok gerakan afirmatif. Kelompok profesional biasanya membentuk sejumlah program-program akreditasi.

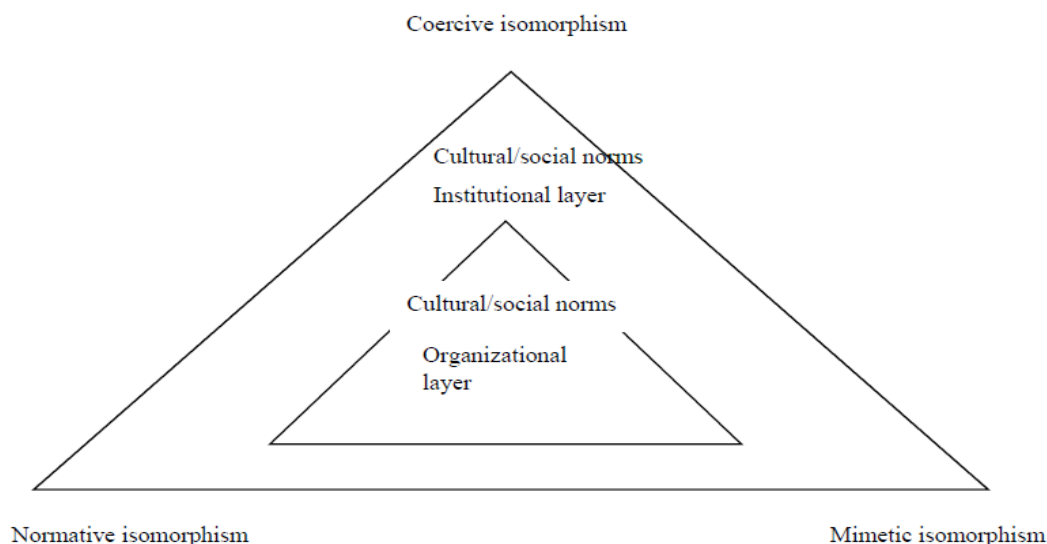
- c) Penyesuaian prosedural. Disamping struktur, organisasi biasanya terpengaruh untuk melakukan sesuatu dalam beberapa cara. Kadangkala penyesuaian, atau adopsi adalah hasil dari ketidakpastian, atau paksaan (*coersive*), dan pemaksaan normatif. Pada umumnya rasionalitas mitos, atau ritual diacu dari Meyer dan Rowan (1977), sebagai prosedur standar pada program TQM (Total Quality Management), yaitu perusahaan mencoba membuat lingkungan yang baik untuk menghasilkan produk yang sempurna, serta PERT Chart (*Program Evaluation Review Techniques*) untuk mencapai standar prosedur pengoperasian yang dibutuhkan oleh pemerintah, dan kelompok profesional (DiMaggio, dan Powell, 1983). Para pengacara menjadi perantara bagi keduanya, dan menguasai sebagian prosedur keorganisasian.
- d) Penyesuaian personil. Organisasi modern memiliki berbagai aturan spesialisasi, disertai dengan sertifikat profesional (khususnya pada organisasi di Barat). Penyesuaian terhadap aturan-aturan institusi biasanya perlu untuk menyewa, atau menggunakan personil yang spesifik. Kebutuhan lisensi, atau akreditasi biasanya harus memenuhi presentasi

(%) kualifikasi personil dalam posisi kunci. Sertifikat sangat penting sebagai sumber legitimasi. Kebutuhan pendidikan selalu meningkat sesuai bagian dari posisi kerja, walaupun tidak jelas hubungan antara tujuan pendidikan dengan produktifitas. Hal ini terlihat jelas pada benda institusional ketimbang ketrampilan teknis yang berbasis pada efektivitas. Memiliki selemba sertifikat, atau pekerja berpendidikan merupakan signal bagi lingkungan bahwa seseorang merupakan pekerja modern, perusahaan yang bertanggungjawab menggunakan kriteria rasional dalam menyeleksi, dan mempromosikan personilnya.

Pada gambar 2.1, menggambarkan bahwa lingkungan institusional ada 2 lapisan: institusional, dan organisasi. Pada setiap tingkatan (yaitu kognitif, normatif, dan koersif) menggambarkan praktek pelaporan tanggungjawab sosial perusahaan. Atribut budaya mengikat simpul didalam, dan diantara pengadopsian, ini sesuai dengan penelitian dari Adnan, *et.al.* (2011, h.4) bahwa aspek budaya, dan kelembagaan harus secara simultan mempengaruhi praktek pelaporan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan multinasional diseluruh negara. Pernyataan dari Adnan, *et.al.* (2011) tersebut, didukung oleh penelitian dari Adams dan Larrinaga (2007) yang menunjukkan bahwa teori institusional memiliki potensi sebagai penjelasan dari akuntansi sosial, dan lingkungan. Argumen tersebut didasarkan pada simpulan dari proses legitimasi. Amran, dan Devi (2008) mendukung argumen tersebut dengan penelitian yang telah dilakukan, dimana institusional menggambarkan legitimasi sebagai hasil persamaan antara

lingkungan organisasi, dan lingkungan budaya, dengan fokus yang lebih baik pada aspek kognitif.

Gambar2.1
Kerangka Kerja Teoritis Institusional



Sumber : Adnan, *et.al.* (2011, h.4).

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.1.2.1 Definisi Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut ISO 26000 (2007), *Guidance on Social Responsibility*, tanggungjawab sosial perusahaan merupakan tanggungjawab organisasi atas dampak yang ditimbulkan dari sebuah keputusan, dan aktivitas dimasyarakat, serta lingkungan melalui transparansi, dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan, dan kesejahteraan dari masyarakat, pertimbangan terhadap *stakeholders*, sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan dari norma internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Sedangkan menurut *The World Business Council for Sustainable Development*

(WBCSD) (2002), tanggungjawab sosial perusahaan adalah suatu komitmen bisnis yang berkelanjutan dari perusahaan dengan bertindak sesuai dengan etika, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan, keluarga karyawan, masyarakat sekitar, serta masyarakat lain yang lebih luas. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mementingkan laba, atau keuntungan saja dalam kegiatan operasional perusahaan multinasional, tetapi juga diwajibkan untuk bertanggungjawab atas masalah sosial, dan lingkungan. Adapun kegiatan yang dilakukan tanggungjawab sosial perusahaan menurut WBCSD, mencakup: hak asasi manusia, hak karyawan, perlindungan lingkungan, hubungan pemasok, keterlibatan komunitas, hak pemangku kepentingan, pemantauan kinerja tanggungjawab sosial perusahaan, dan penaksiran.

Menurut Gray, *et.al.* (1987), ruang lingkup tanggungjawab sosial perusahaan, antara lain: (a) tanggungjawab dasar (*basic responsibility*), tanggungjawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. Contohnya, kewajiban membayar pajak, mentaati hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham; (b) tanggungjawab organisasi (*organizational responsibility*), tanggungjawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan *stakeholders*, yaitu karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat; (c) tanggungjawab sosial (*societal responsibility*), tanggungjawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis, dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh, serta berkembang secara berkesinambungan. Oleh karena itu, tanggungjawab perlu diungkapkan oleh perusahaan agar informasi mengenai

kegiatan tanggungjawab sosial yang lebih transparan untuk masyarakat, atau pemangku kepentingan.

2.1.2.2 Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)*

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan memberikan informasi kepada publik mengenai kegiatan perusahaan dengan masyarakat, lingkungan, karyawan, konsumen, dan penggunaan energi di perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 menyatakan bahwa:

Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang, dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lingkungan. Tanggungjawab sosial, dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan, serta diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan, dan kewajaran. Jika perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggungjawab sosial akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CSRD merupakan bentuk pengkomunikasian efek sosial, dan lingkungan atas tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok tertentu, serta masyarakat secara keseluruhan. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dapat membangun kepercayaan masyarakat dengan segala aktivitas operasional perusahaan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan semata melainkan juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan dari aktivitasnya. Di Indonesia, praktik pengungkapan tanggungjawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Paragraf 9, yang menyatakan bahwa:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, seperti: laporan mengenai lingkungan hidup, dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting, dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

Perusahaan tidak hanya wajib melakukan kegiatan pertanggungjawaban sosial, dalam UU No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas, juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas tanggungjawab sosialnya dalam laporan tahunan. Walaupun pengungkapan tanggungjawab sosial di Indonesia sudah wajib diungkap, namun item-item tanggungjawab sosial perusahaan yang diungkapkan oleh perusahaan, merupakan informasi yang masih bersifat sukarela (*voluntary*). Pengungkapan sosial, dan lingkungan secara umum terjadi melalui media, seperti: laporan tahunan, iklan, kelompok fokus, serikat pekerja, buku, pembelajaran sekolah, dan sebagainya.

Studi ini akan mengikuti definisi yang digunakan oleh Hackston, dan Milne (1996), mencakup 5 item yang ditemukan dalam laporan tahunan, dan website perusahaan, yaitu lingkungan, sumber daya manusia, energi, keterlibatan masyarakat, dan juga produk. Adams, *et.al.* (1998) (dikutip oleh Siregar, dan Bachtiar, 2010), mengungkapkan bahwa perusahaan di Jerman, Perancis, Switzerland, UK, dan Belanda, secara umum mengungkapkan aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan melalui laporan tahunan. Maka dari itu, laporan tahunan juga menjadi salah satu sumber tanggungjawab sosial perusahaan. Kent,

dan Chan (2003) (dalam Siregar, dan Bachtiar, 2010, h.243) menyebutkan bahwa, ada beberapa alasan untuk menggunakan laporan tahunan, antara lain:

1. Laporan tahunan merupakan sumber pokok dari komunikasi perusahaan untuk investor, dan secara luas digunakan untuk mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan,
2. Penyajian informasi keuangan, dan sosial didalam satu dokumen pada satu jalur untuk mengurangi biaya pengungkapan,
3. Laporan tahunan juga merupakan tipe informasi yang lebih efektif dalam menekan suatu kelompok,
4. Laporan tahunan secara penuh dikendalikan oleh manajemen.

Menurut Elkington (1997), model awal perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan adalah dengan menggunakan konsep *triple bottom line*. Konsep *triple bottom line* memperhatikan tiga aspek, yaitu *economic prosperity*, *enviromental quality*, dan *social justice*. Berdasarkan ketiga konsep ini, perusahaan yang ingin terus berkelanjutan maka perusahaan tersebut harus melihat dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang timbul dari operasi perusahaan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, antara lain: (1) meningkatkan citra perusahaan, (2) disukai konsumen, (3) diminati oleh investor, dan (4) dipahami oleh pemangku kepentingan. Sekarang ini, laporan keberlanjutan perusahaan di seluruh dunia hampir menggunakan standar pelaporan yang digagas oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). Konsep laporan tanggungjawab sosial perusahaan yang

digagas oleh GRI muncul sebab akibat dari adanya konsep perkembangan berkelanjutan (*sustainability development*). Pelaporan keberlanjutan dalam standar pelaporan GRI memperhatikan tiga aspek, atau indikator, yaitu indikator kinerja ekonomi (*economic performance indicators*), indikator kinerja lingkungan (*environment performance indicators*), dan indikator sosial (*social performance indicators*).

2.1.3 Tatakelola Perusahaan atau *Corporate Governance* (CG)

2.1.3.1 Definisi Tatakelola perusahaan

Menurut *Organization for Economic Cooperation, and Development* (OECD), istilah tatakelola perusahaan merupakan suatu sistem untuk mengarahkan, dan mengendalikan perusahaan. Selain itu, *Indonesian Institute for Corporate Governace* (IICG) mendefinisikan tatakelola perusahaan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan, dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), tujuan tatakelola perusahaan adalah “untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”. Struktur tatakelola perusahaan menetapkan distribusi hak, dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi, seperti: dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, FCGI menyatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) merupakan struktur yang berperan dalam menetapkan distribusi hak, dan kewajiban antara berbagai

kepentingan di dalam perusahaan, antara dewan komisaris, dewan direksi, manajer perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya demi terciptanya keseimbangan kewenangan.

Penerapan praktik GCG juga diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, tatakelola perusahaan adalah:

Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha, dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan dari pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan perundangan, dan nilai-nilai etika.

Organ yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan dewan direksi, sedangkan pemangku kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung, maupun tidak langsung. Dalam pengimplementasikan GCG terdapat beberapa prinsip agar seluruh pihak di dalam organisasi dapat patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Menurut Pedoman Umum GCG Indonesia (2006, h.5), terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam GCG, yaitu:

- a) *Transparancy* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, serta keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil, dan relevan mengenai perusahaan, termasuk tentang kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan,

- b) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.,
- c) *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan dengan prinsip korporasi yang sehat, serta peraturan perundangan yang berlaku,
- d) *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan, serta pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat,
- e) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil, dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Ada empat manfaat penerapan tatakelola perusahaan (FCGI, 2001), yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan,
2. Mempermudah dalam memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah, dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*),
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan nilai pemangku kepentingan (*shareholders's values*), dan dividen.

2.1.3.2 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan salah satu dari karakteristik tatakelola perusahaan. Struktur kepemilikan yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu konsentrasi kepemilikan, dan tipe kepemilikan, antara lain: kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.

2.1.3.2.1 Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan merupakan tingkatan kepemilikan dari saham perusahaan yang dimiliki oleh beberapa investor mayoritas di perusahaan, atau pihak yang telah diusulkan sebagai pengaruh pada kebijakan pengungkapan (Roberts, 1992 dalam Reverte, 2009, h.356). Kepemilikan yang terkonsentrasi akan mengurangi kuantitas dalam pemegang saham di sebuah perusahaan, sehingga konflik antara manajemen dengan pemangku kepentingan dapat diatasi (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Reverte, 2009, h.356). Semakin sedikit kepentingan pihak mayoritas yang ada di sebuah perusahaan, maka akan semakin sedikit konflik yang terjadi di sebuah perusahaan, dengan demikian manajer dapat mengelola kepentingan yang sedikit dari kepentingan pihak mayoritas tersebut. Jika saham perusahaan yang dimiliki pihak mayoritas sedikit, maka dapat dibuat kebijakan pelaporan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan untuk

mengurangi asimetri informasi. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham yang terkonsentrasi tinggi, maka dapat mengurangi motivasi dalam mengungkapkan tambahan informasi lingkungan perusahaan. Kebijakan tersebut dijalankan jika perusahaan memberikan informasi tanggungjawab sosial perusahaan langsung kepada pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut (Reverte, 2009). Argumen tersebut diperkuat oleh bukti penelitian dari Brammer dan Pavelin (2008), dimana perusahaan memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan yang lebih baik, maka akan membuat perusahaan lebih sedikit dalam mengungkapkan kebijakan lingkungan perusahaan.

2.1.3.2.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial mewakili proporsi entitas saham yang dimiliki oleh entitas manajemen. Entitas manajemen perusahaan yang mewakili kepemilikan saham perusahaan, yaitu dewan komisaris, dan dewan direksi (Puspitaningrum, dan Atmini, 2012). Dengan adanya kepemilikan usaha oleh manajemen, maka manajemen akan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Manajemen akan memperoleh manfaat, dan resiko yang langsung diambil dari pengambil keputusan tersebut. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial dalam rangka meningkatkan *image* perusahaan. Selain itu, mekanisme tatakelola perusahaan mempunyai kapabilitas untuk mengurangi perilaku opportunistik, dan asimetri informasi yang dapat mengurangi tingkat

pemantauan, serta pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan oleh manajemen sebagai pemilik saham (Puspitaningrum, dan Atmini, 2012).

2.1.3.2.3 Kepemilikan Asing

Salah satu tipe kepemilikan saham di perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing, yaitu kepemilikan asing. Menurut Suchman (1995), perusahaan dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan legitimasi berdasarkan pemangku kepentingan, dimana secara tipikal berdasarkan atas *home market* (pasar tempat beroperasi) yang dapat memberikan eksistensi tinggi dalam jangka panjang. Dengan adanya kontrak dengan pemegang kepentingan asing, maka akan meningkatkan perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial. Ada beberapa alasan dimana perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing akan memberikan pengungkapan yang lebih luas, antara lain: Pertama, bahwa perusahaan asing lebih mengenal konsep praktik, dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Kedua, perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. Ketiga, perusahaan tersebut memiliki sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal, dan kebutuhan perusahaan induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum (Said, *et.al.*, 2009).

2.1.3.2.4 Kepemilikan Pemerintah

Hubungan kepemilikan pemerintah pada pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terakhir didiskusikan secara luas pada literatur (Ghazali, 2007; Amran dan Devi, 2008; Haji, 2013). Privatisasi pemerintah yang meningkat diindikasikan bahwa badan pemerintahan diorientasikan secara *profit*, dibandingkan pengungkapan secara sosial, menimbulkan pemerintahan untuk merespon kepastian dari prospek sosial, dan lingkungan (Amran, dan Devi, 2008). Oleh karena itu, baru-baru ini penelitian tanggungjawab sosial perusahaan menemukan hubungan yang positif, dan signifikan antara kepemilikan pemerintah, dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Ghazali, 2007; Amran dan Devi, 2008; Said, *et.al.*, 2009). Penelitian tersebut menunjukkan kepemilikan pemerintah secara tidak langsung mencerminkan kepemilikan oleh publik, maka untuk melakukan program sosial yang lebih bersahabat, dan mengungkapkan kegiatan tersebut akan melegitimasi keberadaan masyarakat (Ghazali, 2007). Komitmen pemerintah dalam aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan juga diteliti baru-baru ini, yang menunjukkan hubungan signifikan dalam pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan oleh Esa, dan Ghazali (2007). Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di perusahaan dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh rakyat. Pemerintah juga berperan sebagai regulator, dan apabila regulator tersebut memiliki proporsi kepemilikan oleh perusahaan, maka akan memiliki kekuatan dalam menekan suatu kelompok perusahaan untuk melaksanakan setiap peraturan pemerintah

dalam hal mengenai tanggungjawab sosial perusahaan, serta pengungkapannya (Said, *et.al.*, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan baik di dalam, maupun luar negeri, antara lain: penelitian dari Ghazali (2007) yang melakukan penelitian mengenai struktur kepemilikan, dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan di Malaysia. Struktur kepemilikan diukur dengan konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintahan. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, serta persaingan industri. Selain itu, penelitian ini menggunakan 87 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Indeks Bursa Malaysia. Untuk alat penelitiannya menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, dan kepemilikan pemerintah memiliki hubungan positif, dan signifikan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Huafang, dan Jiangou (2007) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara struktur kepemilikan, dan komposisi dewan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial pada perusahaan yang terdaftar di China. Variabel independen yang digunakan, antara lain: *blockholders ownership*, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, *legalperson ownership*, *CEO duality*, dan komisaris independen. Sampel penelitian ada 559 perusahaan, perusahaan tersebut yang terdaftar di SEE China, namun perusahaan

yang bergerak di sektor finansial tidak termasuk di dalam sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi OLS. Hasil penelitian ini menunjukkan *blockholder ownership*, kepemilikan asing, dan dewan komisaris independen memiliki hubungan positif, serta signifikan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Amran, dan Devi (2008) melakukan penelitian mengenai dampak pengaruh afiliasi pemerintah, dan asing pada laporan sosial perusahaan. Variabel independen yang digunakan, antara lain: kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dependensi pemerintah, dan dependensi partner asing. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, dan keanggotaan industri. Sampel data dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan menggunakan teknik *sampling random*. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan pemerintah, dan dependensi pemerintah memiliki hubungan positif, serta signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Hasil penelitian dari Ghazali (2007), sama seperti hasil dari penelitian Said, *et.al.* (2009) yang melakukan penelitian mengenai karakteristik tatakelola perusahaan, dan pengungkapan tanggungjawab sosial pada perusahaan di Malaysia. Tatakelola perusahaan diukur dengan ukuran dewan, independensi dewan, peran ganda CEO, komite audit independen, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, dan profitabilitas sebagai variabel

kontrol. Peneliti menggunakan 150 sampel data dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2006. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda dalam penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dua variabel yang memiliki hubungan positif dengan luas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yaitu kepemilikan oleh pemerintah, dan komite audit, serta variabel yang signifikan adalah kepemilikan saham oleh pemerintah.

Reverte (2009) melakukan penelitian mengenai penentuan dari tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Spanyol. Variabel independen yang digunakan, antara lain: ukuran perusahaan, sensitivitas lingkungan, profitabilitas, konsentrasi kepemilikan, *international listing*, dan *media exposure*. Sampel data dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Madrid Stock Exchange dan termasuk dalam indeks IBEX 35. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi linear. Hasil penelitian ini menunjukkan *international listing*, dan sensitivitas lingkungan memiliki hubungan positif, serta signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Selain itu, Siregar dan Bachtiar (2010) melakukan penelitian mengenai laporan sosial perusahaan dengan bukti empiris dari *Indonesian Stock Exchange*. Variabel independen yang digunakan, antara lain: ukuran dewan komisaris (positif, dan non linear), kepemilikan asing, total aset, ROE (*return on equity*), dan DER (*debt to equity ratio*). Sampel data dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di *Indonesian Stock Exchange*. Penelitian ini

menggunakan analisis deskriptif, metode analisis konten, dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran dewan komisaris, dan total aset memiliki hubungan positif, serta signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Khan, *et.al.* (2010) melakukan penelitian mengenai *corporate governance*, dan *corporate social responsibility*. Karakteristik *corporate governance* yang diteliti, seperti: kepemilikan manajerial, *public ownership*, kepemilikan asing, *board independence*, dualitas CEO, dan keberadaan komite audit. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas. Sampel data dalam penelitian ini terdiri dari 116 perusahaan yang terdaftar dalam *Dhaka Stock Exchange* (DSE) di Bangladesh periode tahun 2005-2009. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini, menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *public ownership*, kepemilikan asing, *board independence*, dan keberadaan komite audit memiliki hubungan positif, serta signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Rouf, dan Harun (2011) melakukan penelitian mengenai *corporate governance*, dan pengungkapan *voluntary*. Karakteristik *corporate governance* yang diteliti, seperti kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, adalah total aset, dan *sales turnover*. Sampel data dalam penelitian ini, terdiri dari 94 perusahaan yang

terdaftar dalam *Dhaka Stock Exchange* (DSE) di Bangladesh periode tahun 2006-2007. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini, menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan *voluntary*. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dan total aset memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Soliman, *et.al.* (2013) melakukan penelitian mengenai *corporate governance*, dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Karakteristik *corporate governance* yang diteliti, seperti: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, adalah umur perusahaan, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan leverage. Sampel data dalam penelitian ini, terdiri dari 50 perusahaan yang terdaftar dalam *Egyptian Stock Exchange* periode tahun 2007-2009. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini, menunjukkan kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan asing, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif, serta signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Haji (2013) melakukan penelitian mengenai kelebihan batas waktu pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan: bukti dari Malaysia. Variabel independen yang digunakan, antara lain: pengungkapan tanggungjawab

sosial perusahaan, ukuran dewan komisaris, pertemuan dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintahan. Variabel kontrol yang digunakan, antara lain: ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Sampel data dalam penelitian ini, menggunakan 85 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2006-2008. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini, menunjukkan ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif, serta signifikan terhadap *extent and quality of CSRD*.

Naser, dan Hassan (2013) melakukan penelitian mengenai tatakelola perusahaan, dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Karakteristik tatakelola perusahaan yang diteliti, seperti: profitabilitas, *leverage*, tipe industri, status perusahaan audit, lokasi kantor pusat, kepemilikan pemerintah, dan ukuran perusahaan. Sampel data dalam penelitian ini, terdiri dari 65 perusahaan yang terdaftar dalam *Abu Dhabi Securities Exchange* periode tahun 2011. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis konten, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini, menunjukkan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tipe industri memiliki hubungan positif, dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

TABEL 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel Dependen	Variabel Independen	Variabel Kontrol	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ghazali, Nazli A.M (2007).	Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.	Konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintahan.	Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan persaingan industri.	<i>Annual report perusahaan di Malaysia.</i>	Regresi berganda.	Ukuran perusahaan, dan kepemilikan pemerintah memiliki hubungan positif, dan signifikan terhadap luas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.
2.	Huafang, dan Jiangou (2007)	Luasnya pengungkapan sukarela	<i>Blockholders ownership</i> , kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, <i>legalperson ownership</i> , CEO <i>duality</i> , dan komisaris independen.	Tidak ada.	<i>Annual report perusahaan yang terdaftar di SEE China</i>	Regresi OLS	<i>Blockholder ownership</i> , kepemilikan asing, dan dewan komisaris independen memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan sukarela.
3.	Amran dan Devi (2008).	Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.	Kepemilikan pemerintah, dependensi pemerintah, kepemilikan asing, dan dependensi partner asing.	Ukuran perusahaan, dan keanggotaan industri.	<i>Annual report perusahaan serta responden di Malaysia.</i>	Regresi berganda.	Kepemilikan pemerintah, dan dependensi pemerintah memiliki hubungan positif, serta signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

4.	Said, <i>et. al.</i> (2009).	Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.	Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dualitas CEO, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.	Ukuran perusahaan dan profitabilitas.	<i>Annual report</i> perusahaan publik di Malaysia.	Regresi berganda.	Komite audit, dan kepemilikan saham oleh pemerintah memiliki hubungan positif, dan signifikan terhadap luas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.
5.	Reverte (2009).	Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.	Ukuran perusahaan, sensitivitas lingkungan, profitabilitas, konsentrasi kepemilikan, <i>international listing</i> , dan <i>media exposure</i> .	Tidak ada.	<i>Annual reports</i> perusahaan di Spanyol.	Analisis regresi linier.	<i>International listing</i> , dan sensitivitas lingkungan memiliki hubungan yang positif. serta signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dibandingkan variabel lainnya.
6.	Siregar dan Bachtiar (2010).	Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.	Ukuran dewan komisaris, kepemilikan asing, Total aset, ROE, dan DER.	Tidak ada.	<i>Annual report</i> .	Metode analisis konten, dan regresi berganda.	Ukuran dewan komisaris, dan total aset memiliki hubungan positif, serta signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.
7.	Khan, <i>et.al.</i> (2010).	Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.	Kepemilikan manajerial, kepemilikan publik,	Ukuran perusahaan, umur	<i>Annual report</i> perusahaan yang terdaftar	Regresi berganda.	<i>Public ownership</i> , kepemilikan asing, <i>board independence</i> , dan keberadaan komite audit memiliki hubungan

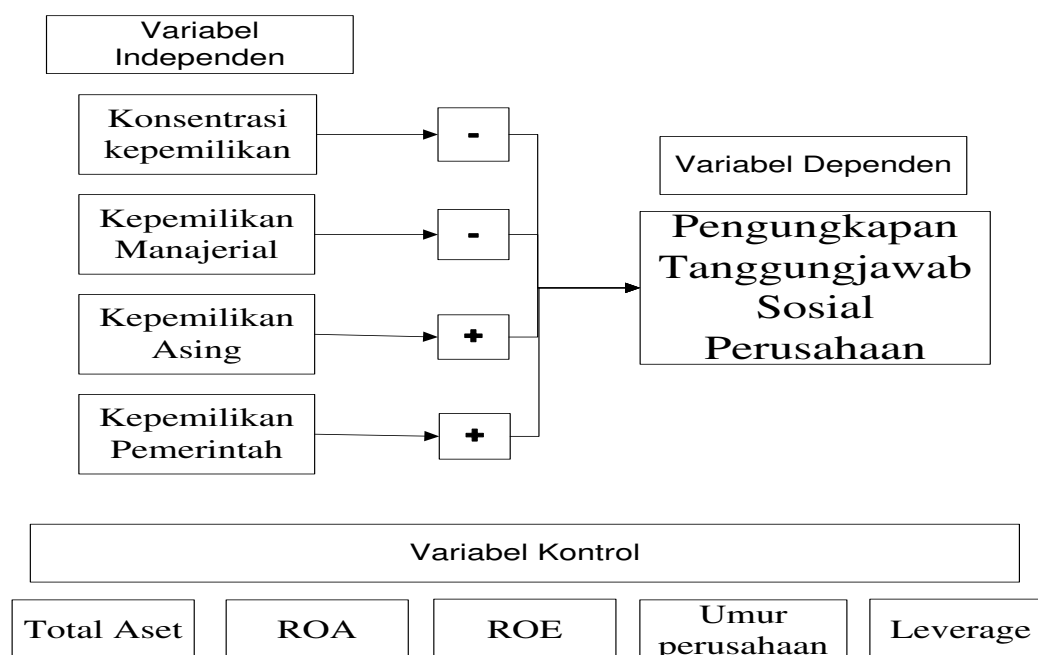
			kepemilikan asing, dewan komisaris independen, dualitas CEO, dan keberadaan komite audit.	perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas.	di Bangladesh yang termasuk dalam <i>Dhaka Stock Exchange</i> .		positif, dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.
8.	Rouf, dan Harun (2011).	Pengungkapan <i>voluntary</i> .	Kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.	Total aset, dan <i>sales turnover</i> .	<i>Annual report</i> perusahaan yang terdaftar di <i>Dhaka Stock Exchange</i> (DSE).	Regresi Berganda.	Kepemilikan institusional, dan total aset memiliki hubungan yang positif, dan signifikan.
9.	Soliman, <i>et.al.</i> (2012).	Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing.	Umur perusahaan, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan <i>leverage</i> .	<i>Annual report</i> perusahaan yang terdaftar di <i>Egyptian Stock Exchange</i> .	Analisis Regresi Berganda.	Kepemilikan institusional, kepemilikan asing, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif, dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.
10.	Haji (2013).	<i>Extent and Quality of CSRD</i> .	Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, ukuran dewan komisaris, pertemuan dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial,	Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan <i>leverage</i> .	<i>Annual report</i> perusahaan di Malaysia.	Analisis regresi berganda.	Ukuran dewan komisaris dan ukuran Perusahaan mempunyai hubungan positif, dan signifikan terhadap <i>extent and quality CSRD</i> .

			kepemilikan pemerintah.				
11.	Naser, dan Hassan (2013).	Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.	Profitabilitas, <i>leverage</i> , tipe industri, status perusahaan audit, lokasi kantor pusat, kepemilikan pemerintah, dan ukuran perusahaan.	Tidak ada.	<i>Annual report</i> perusahaan yang terdaftar di <i>Abu Dhabi Securities Exchange</i> .	Analisis konten, dan regresi berganda.	Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tipe industri memiliki hubungan positif, dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini terdapat tiga bagian yang akan diteliti, meliputi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan sebagai variabel dependen. Sedangkan untuk variabel independen, meliputi: konsentrasi kepemilikan, serta tiga tipe kepemilikan, yaitu: kepemilikan managerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Terdapat variabel kontrol sebagai pengendali dari hubungan antara pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dengan struktur kepemilikan, antara lain: ukuran perusahaan dengan menggunakan proksi total aset, profitabilitas dengan menggunakan proksi ROA (*return on assets*), dan ROE (*return on equity*), umur perusahaan, serta leverage dengan menggunakan proksi DER (*Debt to Equity Ratio*). Bagan kerangka pemikiran pada gambar 2.2, dibawah ini.

Gambar 2.2
Model Empiris Penelitian



2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Negatif Antara Konsentrasi Kepemilikan Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Konsentrasi kepemilikan ditunjuk dari besarnya hak suara (*voting right*) pemegang saham (baik individu, maupun organisasi) dalam suatu perusahaan (Fan, dan Wong, 2001). Suatu perusahaan dikatakan terkonsentrasi jika hak suara terbanyak dipegang oleh suatu organisasi atau perorangan. Jika proporsi saham dimiliki oleh banyak pihak, maka konflik kepentingan akan terjadi antara *small shareholders* dengan *large shareholders*. Dengan situasi tersebut, manajer perlu insentif untuk bertindak sebaliknya dengan kepentingan *small shareholders* dengan cara memperkecil pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Menurut teori institusional bahwa hubungan negatif antara konsentrasi kepemilikan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terjadi karena pemegang saham mayoritas mendesak manajemen untuk tidak melakukan tambahan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan karena dapat mengurangi jumlah *return* dari pemegang saham mayoritas.

Kebijakan tersebut berjalan selama perusahaan mengungkapkan secara langsung mengenai tanggungjawab perusahaan atas persoalan lingkungan, dan sosial kepada pemegang saham mayoritas. Maka dapat disimpulkan, tingginya tingkat kepemilikan saham oleh pihak mayoritas di perusahaan, akan menimbulkan tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan menjadi rendah, dan sebaliknya. Penelitian Haji (2013) mengindikasikan adanya hubungan negatif, dan tidak signifikan antara konsentrasi kepemilikan dengan

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, penelitian tersebut juga dapat dukungan dari penelitian Reverte (2009). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Said, *et.al.* (2009), dimana ada hubungan negatif, dan signifikan antara luasnya sepuluh besar dari kepemilikan saham perusahaan dengan luasnya pengungkapan sukarela tersebut. Maka dari hasil penjelasan diatas, untuk hipotesis pertama, yaitu:

H_1 : Ada hubungan negatif antara konsentrasi kepemilikan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

2.4.2 Hubungan Negatif Antara Kepemilikan Manajerial Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Kepemilikan manajerial merupakan sebuah mekanisme yang dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Menurut teori institusional bahwa hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terjadi karena manajemen di perusahaan terlibat dalam membuat kebijakan untuk melakukan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan, dan investasi berupa kepemilikan saham di perusahaan, maka akan terjadi kebebasan oleh manajemen dalam mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat kepemilikan saham manajerial di perusahaan, maka akan menimbulkan tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang rendah. Sedangkan, bila

tingkat kepemilikan saham manajerial di perusahaan rendah, dan tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan tinggi terjadi karena adanya keterdesakan manajemen untuk melakukan pemantauan, dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan atas persoalan lingkungan, dan sosial perusahaan yang sesuai dengan kebijakan dari mekanisme tatakelola perusahaan, dengan tujuan untuk menghindari adanya asimetris informasi yang dapat mengurangi tingkat pemantauan, dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, serta perilaku opportunistik (mengambil kesempatan dalam situasi yang ada) (Puspitaningrum, *et.al.*, 2012).

Dalam penelitian terdahulu yaitu Said, *et.al.* (2009) menyatakan bahwa ada hubungan negatif dan tidak signifikan antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Penelitian tersebut berbeda dari penelitian Ghazali (2007), dan Puspitaningrum, *et.al.* (2012). Dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa, ada hubungan antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, hasil yang ditemukan dari hubungan tersebut adalah negatif dan signifikan yang dihubungkan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam perusahaan publik yang terdaftar di Malaysia. Maka dari hasil penjelasan diatas, untuk hipotesis kedua, yaitu:

H_2 : Ada hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

2.4.3 Hubungan Positif Antara Kepemilikan Asing Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing utamanya melihat keuntungan yang berasal dari para pemangku kepentingan yang berdasarkan pada pasar tempat beroperasi sehingga dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam periode jangka panjang. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan merupakan media yang digunakan oleh kepemilikan asing untuk melihat kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Sehingga perusahaan yang memiliki kepemilikan asing terdorong untuk melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Menurut teori institusional, dimana kepemilikan asing memiliki hubungan positif dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terjadi karena organisasi asing yang mendesak perusahaan yang beroperasi di suatu negara untuk melakukan pengungkapan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan dengan ketentuan atau regulasi yang ada.

Menurut DiMaggio dan Powell (1983), teori institusional dari hubungan positif antara kepemilikan asing dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan bahwa asosiasi asing atau partner bisnis asing sangat penting, dimana perusahaan lokal wajib memastikan untuk menarik lebih investasi agar investor asing tetap membeli saham perusahaan. Perusahaan juga diwajibkan untuk menjaga prospek investor asing tersebut, khususnya pengetahuan investor atas persoalan lingkungan, dan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat kepemilikan saham asing di perusahaan, akan menimbulkan tingkat

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan tinggi, dan sebaliknya. Ada dua hasil yang berbeda dalam penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan Khan, *et.al.* (2012) dimana kepemilikan asing memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Ini berbanding terbalik dengan penelitian Amran, dan Devi (2008) dimana ada hubungan positif, dan tidak signifikan antara kepemilikan asing dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Maka dari hasil penjelasan diatas, untuk hipotesis ketiga, yaitu:

H_3 : Ada hubungan positif antara kepemilikan asing dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

2.4.4 Hubungan Positif Antara Kepemilikan Pemerintah Dengan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Pemerintah merupakan sebuah instansi yang didirikan karena adanya sekelompok orang, atau individu yang tinggal di suatu daerah, dan memiliki tugas untuk mengatur sistem pemerintahan disuatu daerah. Kepemilikan pemerintah sendiri merupakan kepemilikan saham di sebuah perusahaan multinasional yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah dapat membeli saham perusahaan karena uang yang didapat pemerintah merupakan hasil pemungutan dari rakyat. Sehingga perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pemerintah wajib melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh masyarakat.

Menurut teori institusional bahwa hubungan positif antara kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terjadi karena institusi pemerintah sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat (*public*) akan menekan perusahaan untuk melakukan kegiatan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan atas persoalan lingkungan, dan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa, tingginya tingkat kepemilikan saham pemerintah di perusahaan, akan menimbulkan tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan tinggi, dan sebaliknya. Dalam penelitian terdahulu, Haji (2013) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Namun untuk hasil penelitian tersebut memiliki perbedaan, dimana pada tahun 2006 terdapat hubungan yang signifikan dan sebaliknya untuk tahun 2009 memiliki hubungan yang tidak signifikan. Maka dari hasil penjelasan diatas, untuk hipotesis keempat, yaitu:

H_4 : Ada hubungan positif antara kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Penelitian ini memiliki tiga variabel, yaitu: variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Variabel independen yang tercantum dalam penelitian ini, meliputi: konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah. Serta penelitian ini menggunakan variabel kontrol, berupa ukuran perusahaan (*total assets*), profitabilitas (ROA, dan ROE), umur perusahaan, serta *leverage* (DER).

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini, adalah pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, merupakan suatu media atau strategi yang digunakan oleh manajemen lingkungan untuk mengkomunikasikan kepada pengguna laporan yang dipublikasikan dalam bentuk laporan keberlanjutan. Informasi tanggungjawab sosial perusahaan yang diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya. Tema yang diungkapkan adalah lingkungan, energi, sumber daya manusia, produk, dan keterlibatan masyarakat. Metode analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengukur pengungkapan

tanggungjawab sosial perusahaan. Analisis isi merupakan suatu metode pengkodifikasian teks dari ciri-ciri yang sama untuk dicantumkan ke dalam berbagai kelompok, atau kategori dengan kriteria yang ditentukan. Pengukuran pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam GRI yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Tema yang dicakup dalam GRI adalah lingkungan, ekonomi, HAM, tenaga kerja, dan lingkungan kerja, produk, serta masyarakat.

Pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan 2 proksi. Pertama, indeks disclosure digunakan untuk mengetahui seberapa luas pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan. Kedua, penelitian ini juga menggunakan metode total pengungkapan jumlah kalimat. Pengukuran pengungkapan menggunakan jumlah kalimat yang dilakukan dengan cara mengamati jumlah kalimat yang diungkapkan oleh perusahaan untuk setiap tema yang dicakup dalam indeks GRI yang memiliki total indikator sebanyak 84 item. Untuk GRI yang digunakan dalam penelitian ini adalah GRI 3.1, sesuai dengan peraturan baru bahwa untuk laporan tahunan periode 2010 keatas akan menggunakan GRI 3.1. Perhitungan indeks yaitu dengan cara membagi jumlah item yang diungkapkan dengan jumlah item secara keseluruhan (Hackton, dan Milne, 1996).

$$\text{Indeks Disclosure} = \frac{\text{Jumlah item informasi CSR yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Total jumlah item informasi CSR sebesar 84 item}} \quad (3.1)$$

$$\text{Total Pengungkapan kalimat} = \sum \text{Jumlah kalimat yang diungkapkan perusahaan} \quad (3.2)$$

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Konsentrasi Kepemilikan

Konsentrasi kepemilikan merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak mayoritas yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan. Konsentrasi kepemilikan diukur dari presentase jumlah saham yang dimiliki oleh sepuluh besar pemegang saham dengan jumlah seluruh saham yang beredar, seperti dalam penelitian Ghazali (2007).

Konsentrasi Kepemilikan =

$$\frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh sepuluh besar pemegang saham}}{\text{Jumlah seluruh saham yang beredar}} \quad (3.3)$$

3.1.2.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajerial. Kepemilikan manajerial diukur dari presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan jumlah seluruh saham yang beredar, seperti dalam penelitian Puspitaningrum, *et.al.* (2012).

$$\text{Konsentrasi Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen}}{\text{Jumlah seluruh saham yang beredar}} \quad (3.4)$$

3.1.2.3 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak perorangan, badan, pemerintah, serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing diukur dari presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing (baik perorangan, atau lembaga) dengan jumlah seluruh saham yang beredar, seperti dalam penelitian Amran, dan Devi (2008).

$$\text{Konsentrasi Asing} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing}}{\text{Jumlah seluruh saham yang beredar}} \quad (3.5)$$

3.1.2.4 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh pemerintah yang berstatus dalam negeri. Kepemilikan pemerintah diukur dari presentase jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah dengan jumlah seluruh saham yang beredar, seperti dalam penelitian Haji (2013).

$$\text{Konsentrasi Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah}}{\text{Jumlah seluruh saham yang beredar}} \quad (3.6)$$

3.1.3 Variabel Kontrol

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dilaporkan dalam laporan tahunan (Trotman, dan Bradley, 1981).

$$Ukuran\ Perusahaan = Nilai\ Buku\ Aset \quad (3.7)$$

3.1.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan sebuah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, atau profit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini adalah ROA (*return on assets*) dan ROE (*return on equity*). ROA, dan ROE dipilih karena merupakan rasio yang dapat menggambarkan kemampuan profitabilitas perusahaan (Said *et.al.*, 2009).

$$ROE = \frac{Laba\ bersih}{Ekuitas\ saham} \quad (3.8)$$

$$ROA = \frac{Earning\ After\ Tax\ (EAT)}{Total\ Assets} \quad (3.9)$$

3.1.3.3 Umur Perusahaan

Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya, umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap *survive*, dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing, serta dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian. Perusahaan yang telah lama berdiri umumnya memiliki profitabilitas yang lebih stabil, dibandingkan perusahaan yang baru berdiri, atau yang masih memiliki umur yang singkat. Perusahaan yang telah lama berdiri akan meningkatkan labanya, karena adanya pengalaman dari manajemen sebelumnya dalam mengelola bisnisnya.

Umur perusahaan diukur dari tanggal pendiriannya maupun dari tanggal terdaftarnya di BEI (Ansah, 2000).

$$Umur\ Perusahaan = \sum umur\ perusahaan\ sejak\ terdaftar\ di\ BEI \quad (3.10)$$

3.1.3.4 Leverage

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage adalah *Debt to Equity Ratio* (DER) (Briano, dan Rodriguez, 2012). DER merupakan salah satu kemampuan perusahaan untuk menghitung kewajiban yang dilunasi baik jangka panjang, dan jangka pendek pada saat perusahaan tersebut akan dilikuidasi. Adapun pengukurannya menggunakan rumus sebagai berikut

$$DER = \frac{Total\ Kewajiban}{Ekuitas\ saham} \quad (3.11)$$

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar (*listing*) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010, 2011, dan 2012, disebabkan karena peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan di seluruh perusahaan Indonesia yang terdaftar di BEI, serta memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, maupun sosial di perusahaan sektor keuangan, dan non keuangan. Kriteria yang digunakan dalam mengambil sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan–perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2010, 2011, dan 2012,
2. Perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan periode tahun 2010, 2011, dan 2012,
3. Perusahaan mengungkapkan informasi yang lengkap berkaitan dengan variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa data kuantitatif yang diukur dalam skala numerik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010, 2011, dan 2012. Alasan pengambilan periode tahun 2010, 2011, dan 2012 adalah karena laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan perusahaan yang terbaru terdapat pada tiga periode tersebut. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), pojok BEI Fakultas Ekonomi Undip, dan *website* perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi, dengan memperoleh data berupa laporan tahunan, dan laporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tahun 2010, 2011, dan 2012. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat data–data yang

diperlukan, mencatat, dan menganalisis laporan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan pada periode tahun 2010, 2011, dan 2012.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran, atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006).

3.5.2 Analisis Trend

Analisis trend atau disebut dengan *time series analysis* digunakan untuk mengestimasi, atau meramalkan nilai pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak, dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Secara teoritis, dalam *time series analysis* yang paling menentukan adalah kualitas, atau keakuratan dari informasi, atau data-data yang diperoleh serta waktu dari data-data tersebut dikumpulkan (Ghozali, 2006).

3.5.3 Uji Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Analisis korelasi tidak menunjukkan hubungan

fungsional, atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara dua variabel tersebut. Jika suatu nilai variabel naik, maka ada hubungan positif antara dua variabel, dan sebaliknya. Analisis korelasi yang digunakan, antara lain: korelasi *pearson product moment*, korelasi *spearman*, dan korelasi *rank kendall* (Ghozali, 2006).

3.5.4 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi berganda, dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas, sebelum melakukan pengujian hipotesis. Berikut ini penjelasan uji asumsi klasik yang digunakan.

3.5.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Ghozali (2006) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu analisis grafik, dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara termudah untuk melihat normalitas residual, yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal, adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Selain itu, pengujian analisis juga dapat dilakukan dengan uji statistik sederhana dengan melihat nilai kurtosis, dan *skewness* dari residual. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

3.5.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ maka terdapat multikolonieritas yang tidak dapat di toleransi, dan variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi agar hasil yang diperoleh tidak bias.

3.5.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2006) salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$) yang telah di *studentized*. Dasar analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas,
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi beganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah terhadap variabel dependen pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

$$CSD = \beta_0 + \beta_1KK + \beta_2KM + \beta_3KA + \beta_4KP + \beta_5TA + \beta_6ROE + \beta_7ROA + \beta_8UMP + \beta_9DER + \epsilon \quad (3.12)$$

Keterangan:

CSD = Indeks pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan

β_0 = Intercept

β = Koefisien regresi model

β_1KK = Konsentrasi Kepemilikan

β_2KM = Kepemilikan manajerial

β_3KA = Kepemilikan asing

β_4KP = Kepemilikan pemerintah

β_5TA = *Total asset*

β_6ROE = *Return on equity*

β_7ROA = *Return on assets*

β_8UMP = Umur Perusahaan

β_9DER = *Debt to Equity Ratio*

ϵ = *Error*

3.5.6 Uji Hipotesis

3.5.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

3.5.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen, atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen,
2. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.6.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas, atau independen secara individual dalam menerangkan variasi

variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan, atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen,
2. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.